



**ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
PADA LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM “X” JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:

Arsyila Citra Dewi

NIM 150810301077

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
PADA LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM “X” JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Arsyila Citra Dewi

NIM 150810301077

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, rahmat, dan karunia sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, Papa, Mama, Kakak, dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat yang tiada henti serta doa, dukungan dan segala pengorbanan kepada saya selama ini;
3. Para pendidik, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang senantiasa memberiku ilmu yang bermanfaat dengan penuh rasa ikhlas;
4. Almamaterku tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tempat dimana aku menimba ilmu dan pengalam sebagai bekal di kehidupan yang lebih tinggi; dan
5. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a dalam pembuatan skripsi ini hingga akhir.

Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan rahmadNya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan berupa pengetahuan bagi yang membacanya.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Asy Syarh)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah : 286)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melawan dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat

(Winston Churchill)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arsyila Citra Dewi

NIM : 150810301077

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam “X” Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan kasaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima saknsi akademik jika dikemudian hari pernyataa ini tidak benar.

Jember, 6 Januari 2019

Yang menyatakan,

Arsyila Citra Dewi

NIM 150810301077

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA LAPORAN
KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM “X” JEMBER**

Oleh

Arsyila Citra Dewi

NIM 150810301077

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Rochman Effendi, S.E, M.Si., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Imam Mas’ud, M.M., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam “X” Jember

Nama Mahasiswa : Arsyila Citra Dewi

NIM : 150810301077

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 27 Desember 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Rochman Effendi, S.E, M.Si, Ak.
NIP. 197102172000031001

Drs.Imam Mas’ud. M.M, Ak.
NIP. 195911101989021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak.
NIP. 197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA LAPORAN
KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Arsyila Citra Dewi

NIM : 150810301077

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

14 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Andriana, S.M.Sc., Ak (.....)

Sekretaris : Nur Hisamuddin, SE, M.SA, Ak, CA (.....)

Anggota : Kartika, SE, M.Sc, Ak (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M., Ak, CA

NIP 197107271995121001

ABSTRAK

**ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA LAPORAN
KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM “X” JEMBER**

ARSYILA CITRA DEWI

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada salah satu koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam yang berada di Jember yaitu Koperasi Simpan Pinjam X. Bermanfaat untuk membantu pihak Koperasi dalam menerapkan SAK ETAP di KSP X. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Koperasi Simpan Pinjam X menjadi objek penelitian. Sumber data berupa teknik observasi, wawancara serta dokumentasi Teknik keabsahan data meliputi Triangulasi, *Transferability*, *Dependability*, dan *Conformability*. Hasil penelitian didapatkan bahwa laporan keuangan yang disusun selama ini oleh KSP X belum sesuai dengan SAK ETAP sebab metode pengakuan yang digunakan masih menggunakan *cash basis*, penyajian pos-pos pada laporan keuangan sangat rinci, tidak mengklasifikasikan beban menurut sifat dan fungsi beban, dan kelengkapan laporan keuangan tidak sesuai sebab belum adanya catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: SAK ETAP, Koperasi, Laporan Keuangan.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION ON FINANCIAL ACCOUNTING
STANDARD EQUITY WITHOUT PUBLIC ACCOUNTABILITY IN
COOPERATION SIMPAN PINJAM “X” JEMBER**

ARSYILA CITRA DEWI

*Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

This research aims to determine the implementation of Entity Financial Accounting Standards without Public Accountability (SAK ETAP) in one of the cooperatives with a type of savings and loan business in Jember, namely Savings and Loan Cooperative X. It is useful to assist the Cooperative in applying for SAK ETAP in KSP X. The type of research used is descriptive qualitative research. The Savings and Loan Cooperative X is the object of research. Data sources in the form of observation, interview and documentation techniques Data validity techniques include Triangulation, Transferability, Dependability, and Conformability. The results of the study found that the financial statements prepared so far by KSP X are not in accordance with SAK ETAP because the recognition method used still uses cash basis, the presentation of items in financial statements is very detailed, does not classify expenses according to the nature and function of expenses, and report completeness finance is not appropriate because there is no record of financial statement.

Keywords: SAK ETAP, SMEs, financial statements.

RINGKASAN

Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman dalam suatu kerangka yang digunakan sebagai prosedur untuk pembuatan laporan keuangan, dengan tujuan agar laporan keuangan yang dibuat menjadi seragam untuk entitas yang sejenis. Terdapat 5 (lima) macam standar akuntansi keuangan yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yaitu PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK-EMKM. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memerlukan pembuatan laporan keuangan sebagai laporan pertanggung jawaban kepada pihak ketiga seperti anggota, masyarakat, dan pemerintah. Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan oleh koperasi dari salah satu standar yang berlaku di Indonesia ialah menggunakan SAK ETAP sebab sebagian besar koperasi merupakan entitas tanpa Akuntabilitas publik yang belum terdaftar di bursa efek Indonesia. Seharusnya semua koperasi sudah banyak mengetahui dan menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan sebab pergantian peraturan PSAK No.27 menjadi SAK ETAP sudah ditetapkan sejak 2011. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi koperasi. Penggunaan SAK ETAP untuk koperasi diharapkan dapat memberikan entitas kemudahan dalam menyusun laporan keuangan sehingga dengan mudah pembaca dalam hal manajemen koperasi atau pihak diluar koperasi dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kinerja koperasi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada salah satu koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam yang berada di Jember yaitu Koperasi Simpan Pinjam X. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu pihak Koperasi dalam menerapkan SAK ETAP di KSP X. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang dihasilkan dari lisan seseorang atau perilaku yang diamati peneliti. Koperasi Simpan Pinjam X menjadi objek penelitian dan sumber data yang dipilih menggunakan data primer dan data sekunder berupa teknik observasi, wawancara serta dokumentasi dalam pengambilan data tersebut. Teknik

keabsahan data yang peneliti gunakan meliputi: (1) *Triangulasi*, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari informan yang berbeda dengan informasi yang diperoleh berupa laporan keuangan; (2) *Transferability*, yaitu menganalisis data yang diperoleh saat melakukan wawancara dan data laporan keuangan dengan hasil pengamatan peneliti sendiri; (3) *Dependability*, yaitu mengaudit hasil yang peneliti dapatkan dengan dicross cek oleh pengurus dan dosen pembimbing; (4) *Conformability*, yaitu membandingkan laporan keuangan yang dimiliki oleh KSP X dengan SAK ETAP dan hasil wawancara yang didapatkan.

Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis terhadap data yang didapatkan selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap laporan keuangan yang telah dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam X dengan hasil wawancara yang didapatkan. Melalui proses identifikasi tersebutlah diperoleh hasil bahwa terdapat ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan KSP X dengan SAK ETAP sehingga diperlukan penyempurnaan dalam penyusunan laporan keuangan yang dimiliki koperasi agar sesuai dengan SAK ETAP meskipun proses dan prosedur penyusunan laporan keuangan selama ini telah dilakukan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Metode pengakuan pendapatan dan biaya saat ini masih menggunakan *cash basis* sehingga diharapkan koperasi dapat menyesuaikan dengan menggunakan metode pengakuan akrual basis agar sesuai dengan SAK ETAP. Koperasi tidak mengklasifikasi penyajian beban-beban pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha menurut sifat dan fungsi beban. Koperasi menyajikan pos-pos pada laporan neraca secara detail tidak sesuai dengan penyajian pos minimal dalam neraca SAK ETAP dan kelengkapan pelaporan yang dimiliki Koperasi masih belum lengkap karena belum dibuatnya catatan atas laporan keuangan.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambaNya sehinggalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak-pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E.,M.Si, Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dalam masa studi dan penyelesaian skripsi ini;
4. Rochman Effendi, S.E, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Imam Mas'ud, M.M.,Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Papa, Mama, dan Kedua Kakakku terimakasih telah menjadi inspirasi dan semangat hidupku. Terimakasih telah mengorbankan segalanya untukku, limpahan kasih sayang, dukungan, serta doa yang kalian berikan hingga detik ini;
7. Sahabat-sahabat penulis sejak SD Intan Prawesti, sahabat mulai dari SMP

hingga saat ini Chiblink yaitu Mita, Vinda, Intan dan Ina yang tiada lelah memberi dukungan, serta doa kepada penulis;

8. Sahabat penulis sejak SMA M.Saifuddin;
9. Sahabat seperjuangan di Universitas Jember Aulia Sekarrini Santara Putri;
10. Sahabat geng Hindus Fahmi Firdaus, Musrifah Ainur, Rahayu Iga, Muham Riyadi;
11. Keluarga KKN 37 Kemuningsari Lor Panti Jember Tahun 2018/2019
12. Sahabat-sahabat Akuntansi 2015 terimakasih untuk kebersamaannya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu mendoakan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT sennatiasa memberikan karunia dan hidayahNya untuk kita semua. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan.

Jember, 6 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAM PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKARTA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Koperasi Secara Umum	6
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	6

2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi	6
2.1.3 Tujuan Koperasi.....	7
2.1.4 Prinsip Koperasi.....	7
2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi.....	7
2.1.6 Keuntungan Koperasi	10
2.1.7 Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain	10
2.2 Koperasi Simpan Pinjam.....	12
2.3 Standar Akuntansi Koperasi	13
2.4 SAK ETAP.....	15
2.4.1 Pengakuan.....	17
2.4.2 Pengukuran	18
2.4.3 Penyajian.....	19
2.5 Laporan Keuangan Koperasi menurut SAK ETAP	20
2.5.1 Neraca	20
2.5.2 Laporan Laba Rugi	20
2.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas	21
2.5.4 Laporan Arus Kas	22
2.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan	23
2.6 Penelitian Terdahulu	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Objek Penelitian.....	19
3.3 Sumber Data.....	19
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	20
3.5 Keabsahan Data	21

3.6 Metode Analisis Data.....	23
3.7 Kerangka Pemecah Masalah	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Objek Penelitian	
4.1.1 Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam X.....	34
4.1.2 Produk dan Jasa Koperasi Simpan Pinjam X.....	34
4.1.3 Stuktur Organisasi.....	35
4.2 Penerapan Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam X	
4.2.1 Komponen Laporan Keuangan KSP X.....	36
4.2.2 Definisi Pos-Pos Dalam Lap.Keuangan KSP X	38
4.2.3 Pencatatan	44
4.2.4 Pengakuan dan Pengukuran	44
4.2.5 Penyajian dan pengungkapan.....	50
4.3 Penyajian Laporan Keuangan KSP X Berdasarkan SAK ETAP	
4.3.1 Neraca	64
4.3.2 Laporan Laba Rugi	66
4.3.3 Laporan Perubahan Ekuitas	68
4.3.4 Laporan Arus Kas	68
4.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

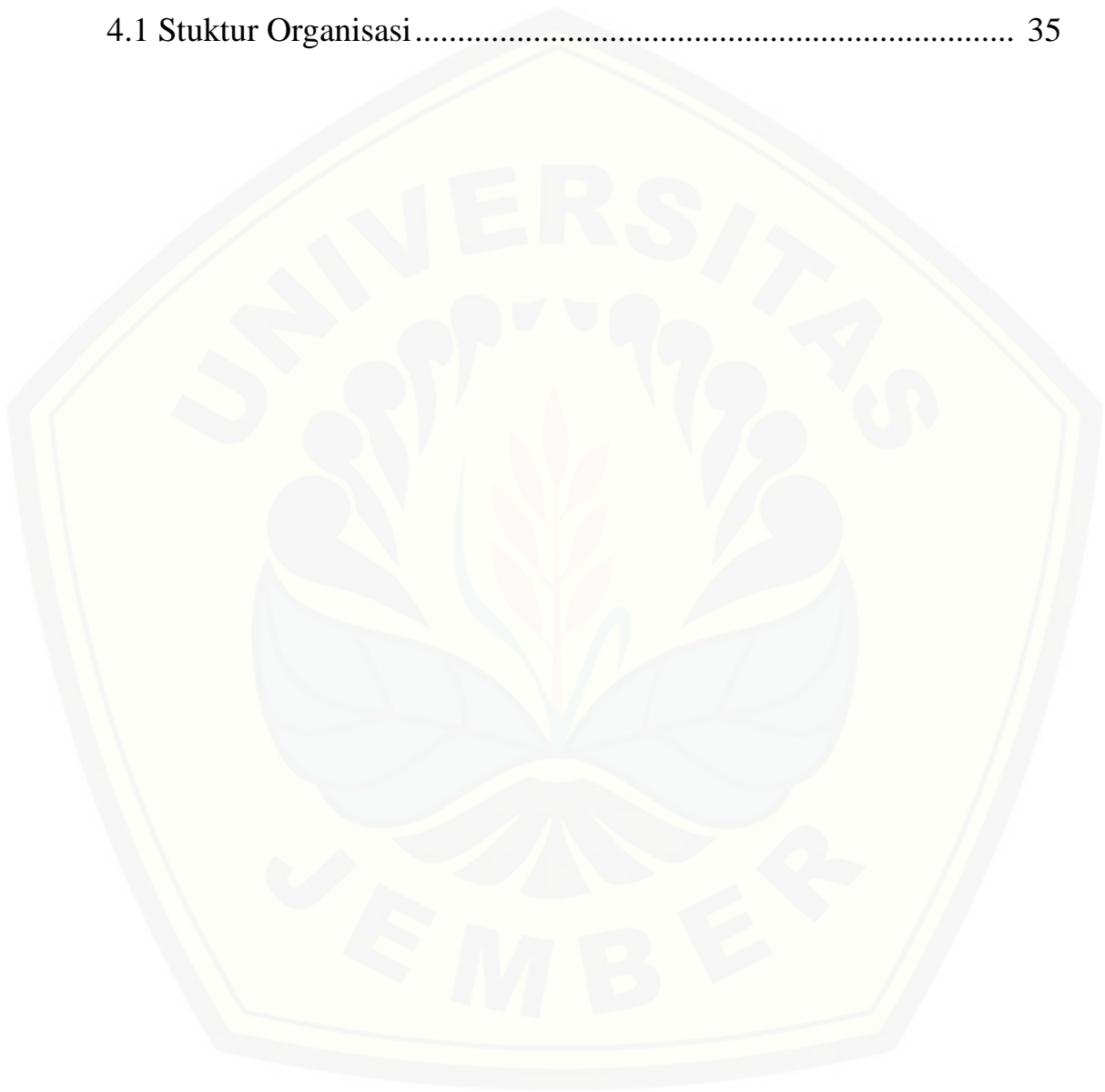
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lain	12
2.2 Penelitian Terdahulu	25
4.1 Perkembangan Anggota KSP X.....	34
4.2 Perbandingan Komponen Laporan Keuangan	38
4.3 Daftar Aset Tetap dan Metode Penyusutan KSP X.....	48
4.4 Penerapan Pos Neraca Menurut SAK ETAP.....	51
4.5 Penerapan Lap.Laba Rugi Menurut SAK ETAP.....	53
4.6 Laporan Arus Kas Menurut SAK ETAP	56
4.7 Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam X Berdasarkan SAK ETAP	59
4.8 Neraca Koperasi Simpan Pinjam X sesuai SAK ETAP	65
4.9 Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha sesuai SAK ETAP.....	67

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Pemecah Masalah	33
4.1 Stuktur Organisasi.....	35



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang mudah ditemui di Indonesia sebab kegiatan koperasi sangat erat dengan budaya yang telah melekat dalam masyarakat yaitu dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi seperti yang tercantum dalam UU RI No.25 Tahun 1992, menimbang:

“bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.”

Secara nasional kegiatan koperasi terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia memiliki kontribusi positif, peran koperasi diharapkan pemerintah untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Menteri Koperasi Dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan:

“Sejalan dengan program presiden dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka koperasi memiliki peran yang strategis.”

Peningkatan kontribusi koperasi terhadap nasional dapat dilihat melalui alat pengukur pendapatan nasional yang dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB), melalui PDB inilah dapat mencerminkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara terukur (Rosyidi, 2009:103). PDB koperasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, didapatkan data pada tahun 2017 kontribusi koperasi sebesar 4,48% dibandingkan dengan PDB koperasi tahun 2016 yaitu sejumlah 3,99%.¹ Meskipun kontribusi koperasi dalam penyumbang kenaikan PDB masih sangat kecil bila dibandingkan dengan sektor yang lain, namun kenaikan tersebut dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan peran koperasi dalam

¹ Data Kementrian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah

mendorong pertumbuhan perekonomian negara serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Peran pemerintah terhadap perkembangan koperasi terus dilakukan dengan pemberdayaan koperasi secara kualitatif maupun kuantitatif hingga dilakukan pembentukan Deputi Pengawasan dibawah naungan Kementrian Koperasi dan UKM bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi koperasi terkait kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, dan penilaian kesehatan², didapatkan data bahwa pada tahun 2017 koperasi aktif di Indonesia sebanyak 153.171 unit yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 40.013 unit³ yang tidak menjalankan RAT setiap tahunnya. Oleh sebab itu bentuk usaha seperti koperasi menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian diberbagai bidang ilmu.

Adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi seperti badan usaha yang lain penting untuk diperlukan penyajian laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh entitas selama periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berfungsi bagi pihak manajemen maupun eksternal sebab dengan adanya SAK dapat memberikan acuan mengenai pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat memberikan manfaat seperti: (1) mewujudkan keseragaman laporan keuangan; (2) memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginteprestasi dan membandingkan laporan keuangan tiap perusahaan; (3) memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku; (4) memudahkan auditor saat mengaudit laporan keuangan entitas; dan (5) adanya regulasi yang mengharuskan entitas dengan kriteria tertentu untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang atau lainnya (Martani, 2016:15).

Sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas koperasi maka diperlukan pengelolaan koperasi secara profesional yaitu dengan

² Pidato menteri koperasi dan UKM RI pada peringatan hari koperasi ke-69

³ Data ODS (*Online Database System*) Kementrian Koperasi dan UKM

menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas agar badan usaha koperasi dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggota ataupun masyarakat luas pada umumnya. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur dengan menyesuaikan standar akuntansi keuangan yang sesuai IFRS. Awalnya pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 namun Dewan Standar Akuntansi Keuangan melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 8 April 2011 menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Pencabutan PSAK No.27 dikarenakan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM serta teknisi IAI menunjukkan hanya 60% koperasi aktif yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari 166.000 unit koperasi yang ada di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang kurang berkompeten untuk mengelola penyusunan laporan keuangan berbasis IFRS, misalnya seperti sulitnya pengelola dalam menentukan transaksi yang dilakukan oleh anggota dengan non anggota dan keterbatasan dalam membuat laporan promosi ekonomi anggota sehingga koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Akhiruddin, 2011).

Penggunaan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan koperasi saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 mengenai akuntansi koperasi namun sebelumnya pemerintah telah menetapkan pedoman akuntansi koperasi pada Peraturan Menteri Nomor: 04/Per/M.KUKM/VII/2012 yang telah menjelaskan bahwa dasar standar pelaporan yang digunakan koperasi yang berlaku tahun 2012 dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis *International Financial Reporting Standard* (IFRS) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis *International Financial Reporting Standard for Small Medium Sized Entitis* (IFRS for SMEs). SAK IFRS digunakan bagi koperasi yang

telah mendaftarkan menjadi entitas *Internal Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia namun mengingat sejauh ini koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik maka koperasi dapat menggunakan dasar penyusunan Standar Akuntansi berbasis Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Pergantian Standar Akuntansi yang lebih sederhana yaitu SAK ETAP dibandingkan dengan standar sebelumnya (SAK berbasis IFRS penuh) diharapkan memudahkan para pelaku koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang efektif namun tidak serumit SAK Umum yang digunakan sehingga koperasi dapat melaksanakan RAT secara berkelanjutan setiap tahunnya. Penyusunan dan pelaporan keuangan koperasi yang masih belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan menyebabkan keterbatasan dan kelemahan pada hasil pelaporan keuangannya. Keterbatasan yang akan dialami koperasi seperti sulitnya mendapatkan opini audit saat auditor mengaudit laporan keuangan koperasi yang berguna untuk mengembangkan permodalan koperasi kepada pemerintah maupun mitra perbankan sebab penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku akan menimbulkan keraguan bagi kreditor (Alfitri, 2012).

Data jumlah koperasi yang berada di Jember tercatat 1.577 unit koperasi aktif dan 287 unit koperasi tidak aktif.⁴ Salah satu koperasi aktif yang berada di Kota Jember adalah Koperasi Simpan Pinjam X, koperasi ini merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam dan tercatat memiliki jumlah anggota aktif sebanyak 368 anggota. Penelitian ini mengambil objek di Koperasi Simpan Pinjam X untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan yang digunakan terhadap koperasi tersebut. Melalui penelitian awal didapatkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Simpan Pinjam X selama ini telah menerapkan SAK ETAP walaupun belum sepenuhnya sehingga dapat dilaporkan dan diperiksa oleh Dinas Koperasi Kabupaten Jember namun belum pernah dilakukan pengauditan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ataupun auditor independen sebab menurut pihak koperasi dengan melaporkan laporan keuangan

⁴ Data jumlah koperasi se-jawa Timur, sumber data: Dinas koperasi dan UKM provinsi Jawa Timur

setiap tahun pada saat rapat anggota dan pelaporan kepada Dinas Koperasi dan UKM sudah cukup.

Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengangkat judul **“Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Etnntitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam “X” Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas penulis mengemukakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam X?
2. Apakah penerapan standar akuntansi keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam X telah sesuai dengan SAK ETAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam X.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam X dengan SAK ETAP.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan refrensi yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan topik penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan koperasi, menggunakan tema yang sama namun dengan objek yang berbeda.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan koperasi.

c. Manfaat Entitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pelaku koperasi mengenai penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan koperasi dengan benar sehingga dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan koperasi

d. Manfaat Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan SAK ETAP, sehingga dapat bermanfaat sebagai cara dalam mengimplementasikan ilmu pada saat kuliah dan adanya penelitian tersebut guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi Secara Umum

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi dikenal sebagai badan usaha yang dibangun dari dan untuk anggota. Hal ini dikarenakan modal pendirian koperasi berasal dari anggotanya dan beroperasi berdasarkan keputusan dari semua anggota yang terdaftar. Menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini mengandung makna bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan usaha yang terkandung. Koperasi menekankan bahwa terdapat kesamaan kepentingan dan hak para anggotanya sehingga keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh semua anggota koperasi. Berbeda dengan badan usaha bukan koperasi yang bergantung pada kekuatan pemilik modal usaha sehingga keputusan diambil sesuai dengan signifikansi kepemilikan modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha ataupun badan hukum yang dijalankan oleh sekelompok orang dan bukan kumpulan modal dengan melandaskan kegiatannya sesuai prinsip koperasi untuk menyejahterakan kepentingan anggotanya pada khususnya.

2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, UU No 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu didalam koperasi dari dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan

dasar tersebut maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2.1.3 Tujuan Koperasi

UU No 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa tujuan pendirian koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari penjelasan tujuan tersebut, hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

2.1.4 Prinsip Koperasi

Di dalam himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan koperasi menjelaskan bahwa prinsip koperasi terdiri dari 5 (lima) poin penting, yakni:

- 1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.

Prinsip ini mengandung makna bahwa koperasi merupakan organisasi bagi yang bersedia menggunakan jasa-jasa yang diberikan secara sukarela dan bertanggung jawab atas status keanggotaan yang dimiliki.

2.1.5 Jenis-jenis Koperasi

Menurut undang-undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Koperasi primer didirikan oleh paling

sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi (UU No.17 Tahun 2012 pasal 7). Sedangkan koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi primer. Menurut UU No.17 Tahun 2012 pasal 7 koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer.

Dari pengertian tersebut maka dalam pendirian koperasi terdapat berbagai jenis koperasi. Penentuan jenis koperasi diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenis-jenis koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 pasal 83 adalah :

1) Koperasi Produsen.

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

2) Koperasi Konsumen.

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Sebagai konsumen, anggota mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam bertugas menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito yang merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

4) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

5) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

2.1.6 Keuntungan Koperasi

Koperasi dapat memperoleh keuntungan dengan bunga yang dibebankan kepada peminjam, semakin banyak uang yang distribusikan maka akan memperbesar keuntungan koperasi. Selain itu dapat diperoleh melalui biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam, keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga (Kasmir, 2016:255). Dapat disimpulkan keuntungan koperasi yaitu:

1. Membebankan biaya bunga kepada peminjam;
2. Membebankan biaya administrasi setiap kali transaksi;
3. Mendapat hasil investasi dari luar kegiatan koperasi.

2.1.7 Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Dari beberapa pengertian tentang koperasi, dari situlah dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi mempunyai mekanisme kerja yang berbeda dibandingkan dengan badan usaha lainnya (Suharto & Fathorrazi, 2013:111). Tujuan yang ingin dicapai dari pendirian koperasi dengan badan usaha lainnya juga berbeda yaitu koperasi didirikan bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*non profit motive*). Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk memperbaiki kesejahteraan anggotanya, sehingga koperasi didirikan untuk mengurangi dampak negatif dari sistem mekanisme pasar. Tujuan pendirian badan usaha lain adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit motive*). Koperasi menekankan pada pemenuhan kebutuhan anggota dari pada mengutamakan modal dan keuntungan, sedangkan badan usaha lain lebih mengutamakan modal dan keuntungan daripada kesejahteraan bersama.

Koperasi harus menjalankan prinsip keanggotaan yang bebas dan terbuka dalam hal permodalan, modal dikoperasi dapat berubah-ubah sesuai dengan keluar masuknya anggota dengan artian bahwa masyarakat dapat bebas keluar masuk menjadi anggota koperasi, padahal setiap anggota ini sebelumnya terkait dengan simpanan yang telah diberikan anggota kepada koperasi. Berbeda dengan badan usaha lainnya seperti CV, firma, maupun perseroan yang mempunyai kuantitas

modal relatif tetap, karena setiap anggota yang memberkan modal terhadap perusahaan tidak dapat keluar masuk seperti mekanisme yang dijalankan oleh koperasi. Selain itu jumlah modal biasanya sudah sesuai dengan saham yang dijualnya, tidak beengaruh antara siapa yang memegang saham dengan jumlah modal yang dapat dihimpun.

Keuntungan yang didapat oleh koperasi tidak diberikan kepada anggotanya hanya berdasarkan pada jumlah modal yang ditanamkannya semata-mata hanya berdasarkan jasa yang diciptakan oleh anggotanya. Jika pada bada usaha lain deviden yang diberikan hanya berdasarkan jumlah saham yang mereka punya.

Sementara untuk kebijakan manajemen, koperasi cenderung *open managemenet* dengan artian bahwa koperasi diharuskan untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan tujuan untuk melaporkan kegiatan sealama satu tahun kepada anggotanya dan memberikan informasi mengenai rencan kegiatan selama setahun kedepan. Hal ini tentu berbeda dengan badan usaha lainnya yang lebih banyak tertutup dalam menginformasikan tentang kegiatan usaha, sehingga badan usaha lain mempunyai kebijakan manajemen yang *close management*.

Kekuasaan tertinggi koperasi berada di anggotanya sebab koperasi bergerak atas sepengetahuan dan persetujuan anggotanya, berbeda dengan badan usaha lain seperti perseroan misalnya, yang lebih banyak ditentukan oleh pemegang saham mayoritas. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya dirangkum dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Koperasi	Badan Usaha Lain
1. Untuk memperbaiki kesejahteraan anggota (<i>Non Profit</i>).	1. <i>Profit motive</i> .
2. Mengutamakan anggota daripada modal hanya sebagai alat.	2. Mengutamakan modal dibandingkan dengan anggota.
3. Keuntungan dibagi menurut jasa anggota.	3. Keuntungan diberikan berdasarkan modal.

Koperasi	Badan Usaha Lain
4. Semua anggota mempunyai hak suara yang sama.	4. Hak suara bergantung kepada besarnya modal.
5. Modal koperasi berubah-ubah tergantung keluar masuknya anggota.	5. Modal badan usaha relatif tetap.
6. <i>Open management.</i>	6. <i>Close management.</i>
7. Kekuasaan berada ditangan anggota	7. Kekuasaan berada ditangan pemegang saham

2.2 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya (KBBI, 2016). Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito yang merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk membantu keperluan kredit para anggotanya, mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur, mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan

anggotanya terhadap perkoperasian (Anoraga dan Widiyanti, 2003:23).

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. UU No.17 Tahun 2012 pasal 50 menjelaskan bahwa pengawas bertugas mengusulkan calon pengurus, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Yang ketiga, manajer koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 32 sampai pasal 37 UU No.17 Tahun 2012.

2.3 Standar Akuntansi Koperasi

Melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan satandar akuntansi keuangan yang dapat digunakan oleh koperasi sebagai pedoman dalam rangka penyusunan laporan keuangannya. Sejak 1994 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) IAI telah menetapkan standar penyusunan laporan keuangan untuk koperasi yaitu PSAK No.27, dari tahun-ketahun PSAK No.27 terus mengalami pembaruan atau perevisian oleh IAI agar standar akuntansi tersebut dapat digunakan menjadi lebih baik oleh koperasi. Namun tanggal 8 April 2011 melalui Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) IAI menetapkan untuk melakukan pencabutan Pernyataann Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Pada tahun 2012 untuk mempermudah pembuatan laporan keungan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan SAK ETAP yang dapat digunakan sebagai acuan pengganti PSAK 27. SAK ETAP dapat digunakan oleh

entitas yang tidak memiliki Akuntabilitas Publik signifikan seperti UMKM dan Koperasi. Melalui hal tersebut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:04/Per/M.KUKM/VII/2012 menimbang:

(d) Bahwa UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian.

Melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM tersebutlah menetapkan bahwa SAK ETAP menjadi pedoman umum akuntansi untuk koperasi. Dalam UU No.17/2012 pasal 37 ayat 1 c bahwa laporan keuangan koperasi sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut berdasarkan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku

Menurut Peraturan Pemerintah Koperasi dan UKM No: 13/Per/M.KUKM/IX/2015, bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari:

1. Neraca, menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.
2. Laporan perhitungan hasil usaha, menyajikan informasi mengenai perhitungan penghasilan dan beban
3. Laporan perubahan ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan dalam ekuitas koperasi selama satu periode.
4. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi sela satu periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, menyajikan pengungkapan yang memuat:
 - a. Pengungkapan kebijakan akuntansi, memberikan penjelasan mengenai pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta penggunaan kebijakan akuntansi lain untuk memahami laporan keuangan tetapi tetap relevan.
 - b. Pengungkapan informasi mengenai pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi.

Penyusunan laporan koperasi menggunakan dasar penyusun atau pedoman:

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), untuk koperasi sektor riil yang tidak memiliki Akuntabilitas publik maka penyajian laporan keuangan dapat mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum), untuk koperasi sektor riil memiliki Akuntabilitas publik maka penyajian laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum).

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Pengertian Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP (IAI, 2013:1) yaitu standar yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Dalam koperasi tentu tidak lepas dari laporan keuangan koperasi.

Penyusunan laporan keuangan tentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Standar yang berlaku saat ini yaitu standar akuntansi entitas tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP) merupakan standar baru yang mulai efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2011. Standar ini merupakan pengganti dari PSAK No. 27 yang mengatur tentang pelaporan keuangan pada koperasi.

SAK ETAP yaitu standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan usaha kecil atau menengah atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) untuk mampu membuat pelaporan keuangan sendiri. Selain itu SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya tetapi tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam beberapa hal SAK ETAP dinilai lebih mudah dipahami karena dalam SAK ETAP terdiri dari seratus halaman dengan menyajikan 30 bab. Hal ini berbeda dengan PSAK yang menurut beberapa orang sulit. SAK ETAP ini disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas. Sehingga lebih mudah dalam penerapan atau praktik secara langsung pada penyusunan laporan keuangan.

Munculnya SAK ETAP dengan maksud agar konvergensi IFRS dapat segera diwujudkan secara penuh. Sehingga perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk menerapkan SAK penuh, dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana. Perbedaan yang paling terlihat antara PSAK no. 27 dengan SAK ETAP adalah tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).

Penetapan SAK ETAP untuk entitas tanpa Akuntabilitas publik berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2011. Kebijakan akuntansi menurut SAK-ETAP ialah:

2.4.1 Pengakuan

Laporan keuangan menurut SAK ETAP disebutkan dalam paragraf 3.12 yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan SAK ETAP mensyaratkan dalam paragraf 3.9 bahwa informasi di dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Ketika menentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang sesuai dengan kriteria yang diatur dikenal istilah pengakuan unsur laporan keuangan. SAK ETAP paragraf 2.24 menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lebih lanjut dalam paragraf 2.28-2.29 menyebutkan bahwa suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Dan suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

Pada saat menyusun laporan keuangan, SAK ETAP dalam paragraf 2.33 mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yang diatur dalam paragraf 2.34 - 2.38 sebagai berikut.

1) Aset

Pengakuan aset diperbolehkan hanya jika aset tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan mengalir dari dan ke entitas tersebut, dan aset

tersebut dapat diukur secara andal. Adanya aset yang tidak diakui disebabkan pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi diduga tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.

Kondisi ini akan menyebabkan timbulnya pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2) Kewajiban

Pengakuan kewajiban dilakukan jika terdapat pengeluaran yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan dapat diukur secara andal.

3) Penghasilan

Pengakuan penghasilan didapat jika terdapat peningkatan aset ataupun penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4) Beban

Pengakuan beban dapat dilakukan jika terdapat penurunan nilai aset dan peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

5) Laba atau rugi

Laba atau rugi merupakan selisih antara penghasilan dan beban yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2.4.2 Pengukuran

SAK ETAP paragraf 2.30 – 2.31 pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umumnya adalah biaya historis dan nilai wajar.

1. Biaya historis

Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai

penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

2. Nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.4.3 Penyajian

SAK ETAP dalam paragraf 3.2-3.4 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar dan harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP bahwa entitasnya mengikuti SAK ETAP. Perihal timbulnya penggunaan kebijakan akuntansi yang bukan diatur di dalam SAK ETAP, maka penjelasan mengenai hal tersebut wajib untuk diungkapkan. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Lebih lanjut dalam paragraf 3.6-3.7 SAK ETAP menyebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terdapat perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau SAK ETAP mensyaratkan adanya suatu perubahan. Dalam hal jika terjadinya perubahan pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi, yaitu sifat reklasifikasi, jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan alasan reklasifikasi.

Dalam menyajikan laporan keuangan yang diatur dalam paragraf 3.10-3.11, pos-pos material yang disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

2.5 Laporan Keuangan Koperasi menurut SAK-ETAP

2.5.1 Neraca

Di dalam penyusunan neraca, SAK ETAP dalam paragraf 4.2 dan 4.4 mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Informasi tersebut meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Lebih lanjut, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Bentuk penyajian aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca sesuai yang disebutkan paragraf 4.5, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

2.5.2 Laporan Laba Rugi

Disamping neraca, laporan yang harus disusun adalah laporan laba rugi. SAK ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi tersebut dalam paragraf 5.2-.5.4 yaitu sebagai berikut. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian

laba atau rugi dari investasi yang menguntungkan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

2.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan perubahan ekuitas diperlukan untuk menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut sesuai yang dijelaskan dalam paragraf 6.2.

Lebih lanjut dalam paragraf 6.4-6.5, disamping laporan perubahan ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi maka SAK ETAP memperbolehkan entitas hanya menerbitkan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan laba rugi dan saldo laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.

2.5.4 Laporan Arus Kas

SAK ETAP menyebutkan dalam bab 7 mengenai laporan arus kas bahwa laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

1) Aktivitas operasi.

Aktivitas operasi memaparkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Hal ini dapat berupa penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan, pembayaran kas atau restitusi pajak, dan penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan dengan tujuan dijual kembali.

Dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, SAK ETAP telah mengatur agar entitas menggunakan metode tidak langsung. Metode ini mengatur penyesuaian laba atau rugi neto dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Penggunaan metode ini fokus pada dampak dari perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan, pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

2) Aktivitas Investasi.

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan cerminan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas tersebut dapat berasal dari pembelian ataupun penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya, pembelian ataupun penjualan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture, pemberian dan penerimaan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada dan dari entitas lain.

3) Aktivitas Pendanaan.

SAK ETAP menyebutkan bahwa arus kas pendanaan dapat berasal dari penerimaan atas penerbitan saham atau efek ekuitas lain, pembayaran kas untuk menarik atau menebus saham entitas kepada para pemegang saham, penerimaan dan pembayaran kas terkait penerbitan dan pelunasan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya, serta pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

2.5.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam paragraf 8.1 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Lebih spesifik, SAK ETAP dalam paragraf 8.2-8.3 mengatur bahwa struktur catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis dan harus memuat tiga poin penting, yakni informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi yang disyaratkan oleh SAK tetapi tidak disampaikan di dalam laporan keuangan, dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
- 2) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
- 3) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- 4) Pengungkapan lain.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Thn	Judul Penelitian	Hasil Penellitian
1.	Hertiyo	2015	Laporan keuangan koperasi Serba Usaha Buah Keyakasi berbasis SAK ETAP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh KSU Buah Ketakasi belum lengkap dan penyajiannya masih belum sesuai dengan SAK ETAP
2.	Fadhli	2015	Analisis Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP di KSU Kencana Makmur Lamongan	Hasil yang diperoleh dari penelitian KSU Kencana Makmur Lamongan masih belum menyajikan laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan SAK ETAP. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan KSU Kencana Makmur Lamongan sudah sesuai dengan SAK ETAP.
3.	Meireny	2016	Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai SAK ETAP (Studi Kasus pada KUD Sumber Alam Ambulu)	Hasil penelitian diperoleh bahwa laporan keuangan Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam Ambulu belum sesuai dengan SAK ETAP dan laporan keuangan yang sudah disusun oleh Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam Ambulu direkonstruksi terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian setiap komponen dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.
4.	Livia	2017	Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan <i>Credit Union</i>

No.	Nama Penulis	Thn	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<i>Credit Union</i> Berdasarkan SAK ETAP pada <i>Credit Union</i> Pancur Kasih Tempat Pelayanan Pemangkat	Pancur Kasih Tempat Pelayanan Pemangkat tahun 2015 belum sepenuhnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan 25 unsur sesuai (69%), enam unsur tidak sesuai (17%), dan lima unsur tidak relevan (14%) dari 36 unsur yang dibandingkan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode penelitian menggunakan diskriptif ialah peneliti akan mendeskripsikan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Hasan, 2006:8).

Penelitian ini akan menggambarkan, memaparkan serta menganalisis standar laporan keuangan periode 2016-2017 yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam X yang ada dengan membandingkan standar laporan keuangan yang berlaku untuk koperasi saat ini

3.2 Objek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini ialah Koperasi Simpan Pinjam X jenis koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam yang berada di Jember Jawa Timur, dalam penelitian ini entitas tidak bersedia untuk mencantumkan nama entitas terhadap penelitian mengingat sumber data yang digunakan dalam penelitian bersifat rahasia untuk publik.

3.3 Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis (Hasan, 2006:19) yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dari objek penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam X, sebab peneliti dapat berhubungan langsung dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian menggunakan sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung sehingga dapat berupa buku-buku ilmiah, penelitian terdahulu, internet. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berupa laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam X.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian dapat dilakukan berdasarkan cara-cara tertentu yang bertujuan sebagai pengumpulan data dengan meninjau langsung pada objek penelitian (Hasan, 2006:23). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi:

a. Wawancara

wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan penelitian dengan melakukan cara tanya jawab, sambil bertatap muka secara lisan antara pewawancara (penanya) dengan responden (penjawab). Dilakukan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara yang akan dilakukan dengan informan yang berkompeten terhadap laporan keuangan yaitu dengan bagian ketua dan bendahara di Koperasi Simpan Pinjam X.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti, naskah kearsipan yang berbentuk rekaman maupun barang cetakan, dan lain sebagainya. Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian dan mendapatkan data-data dengan mengumpulkan arsip dalam bentuk laporan keuangan selama tahun 2016-2017 pada Koperasi Simpan Pinjam X.

3.5 Keabsahan Data

Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan peneliti secara akurat mempresentasikan dunia sosial di lapangan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi credibility (validitas internal) dengan cara triangulasi, tranferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan conformability (objektifitas) (Sugiyono, 2014:137) yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Trianggulasi

Pada penelitian ini, akan digunakan cara triangulasi dalam pengujian data. Menurut Moleong (2004) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam keabsahan data adalah Trianggulasi. Moleong (2001:178) mengatakan bahwa “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pengecekan informasi berupa laporan keuangan koperasi yang disesuaikan dengan SAK ETAP di cross cek dengan laporan yang digunakan selama ini. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dari penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara. Pengamatan dilakukan sebelumnya berupa observasi secara langsung oleh peneliti di lapangan, mengamati langsung bagian akuntansi dan melakukan perbandingan dengan hasil wawancara untuk mendapatkan kesesuaian dan keabsahan data.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Hasil wawancara yang diperoleh dari ketua koperasi dan bagian akuntansi sebagai informan secara pribadi dengan informasi secara keseluruhan dari informan lain. Misalkan ketua

koperasi mengatakan tentang laporan keuangan koperasi belum berdasarkan SAK ETAP, maka pengurus yang lain juga akan mengatakan yang sama.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Proses keabsahan data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara informan dengan informasi secara umum disertai dengan perolehan data sekunder.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil laporan keuangan koperasi X dengan beberapa pendapat dari informan satu terhadap informan yang lain.

b. Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada informan penelitian. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain.

Kreteria *transferability* merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer. Penelitian kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, sehingga ada kemungkinan untuk menrapkan hasil penelitian tersebut, peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, hasil data menjadi jelas dalam memahami hasil penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

Transferability dilakukan dengan cara menganalisis data laporan keuangan yang telah dibuat oleh koperasi X, kemudian peneliti memilih data yang dipakai dalam penelitian.

c. Pengujian Dependability

Kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Pandangan kuantitatif tradisional tentang realibilitas didasarkan pada asumsi replikabilitas (replikability) atau keterulangan (repeatability). Secara esensial itu berhubungan dengan apakah kita akan memperoleh hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan yang sama untuk kali yang kedua. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yaitu dengan pembimbingan hasil penelitian.

d. Pengujian *Conformability*

Pengujian *conformability* dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *conformability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar *conformability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Konfirmabilitas (Konfirmability). Penelitian kualitatif cenderung berasumsi bahwa setiap peneliti membawa perspektif yang kedalam peneliti. Uji *conformability* dalam hal ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan koperasi X dengan SAK ETAP dan kemudian didukung dengan hasil wawancara sehingga dapat dibuat usulan laporan keuangan koperasi X yang sesuai ETAP.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014:189).

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

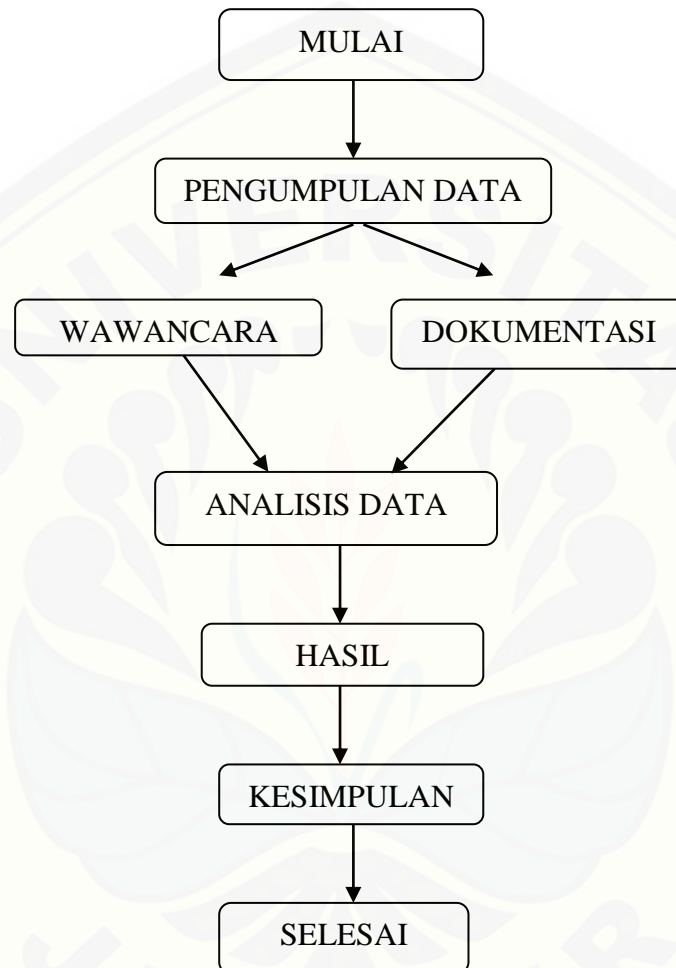
Dalam tahap ini dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini bersifat naratif yang dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi dan merumuskan kesimpulan berdasarkan apa yang dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap terakhir dari model ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan. Kesimpulan sementara ini nantinya akan diverifikasi antara lain dengan triangulasi sumber data.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah merupakan penjelasan sementara mengenai langkah kerja yang akan dilakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Kerangka pemecah masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecah Masalah

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang dilakukan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Koperasi Simpan Pinjam X telah melakukan pencatatan akuntansi setiap bulan dengan menggunakan sistem manual dan sistem terkomputerisasi. Diawali dengan mencatat transaksi secara manual kedalam Buku Kas Masuk (BKM) dan Buku Kas Keluar (BKK), dilanjutkan dengan melakukan penginputan buku kas ke dalam sistem terkomputerisasi berbasis *Microsoft Excel* hingga menghasilkan laporan keuangan yang berupa Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
2. Laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam X belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) hal ini sesuai dengan analisis kesesuaian laporan keuangan bahwa:
 - a. Tidak sesuai dengan SAK ETAP paragraf 2.33 sebab koperasi masih menggunakan dasar pengakuan *cash basis* terhadap penyajian laporan keuangan. Sedangkan pada SAK ETAP entitas harus menyusun laporan keuangan kecuali laporan arus kas dengan menggunakan dasar akrual
 - b. Tidak sesuai dengan SAK ETAP paragraf 3.12 sebab koperasi tidak memberikan pengungkapan mengenai penjelasan laporan keuangan yang dilaporkan berupa Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada pelaporannya. Sementa itu laporan keuangan entitas lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
 - c. Tidak sesuai dengan SAK ETAP paragraf 4.2 sebab koperasi Simpan Pinjam X menyajikan pos-pos dalam laporan keuangan secara detail seperti adanya pos-pos dalam Bank Central Asia, Bank BRI dan Bank Jatim dalam penyajian laporan posisi keuangan. Penyajian pos-pos

detail astas piutang seperti piutang simpan pinjam dan piutang unit toko serta adanya pos-pos investasi jangka panjang secara mendetail.

- d. Tidak sesuai dengan SAK ETAP paragraf 4.8 sebab koperasi tidak dapat mengklasifikasikan antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Hal ini menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam X tidak dapat memperkirakan kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun.
- e. Tidak sesuai dengan SAK ETAP paragraf 5.6 sebab koperasi tidak dapat mengklasifikasikan beban-beban pada laporan laba rugi dengan sifat dan fungsi beban.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Peneliti hanya mengevaluasi penyusunan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam X dalam hal penyajian dan pengungkapan berdasarkan SAK ETAP karena keterbatasan data sehingga tidak dapat merekonstruksi sistem dan prosedur keuangan yang ada di KSP X.
2. Objek penelitian hanya berfokus pada satu Koperasi Simpan Pinjam X yang berada di Jember, sehingga kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara umum.
3. Objek penelitian masih menggunakan dasar pengukuran basis kas sebab keterbatasan data yang didapatkan oleh peneliti tidak dapat merubah dasar pengukuran menjadi akrual.

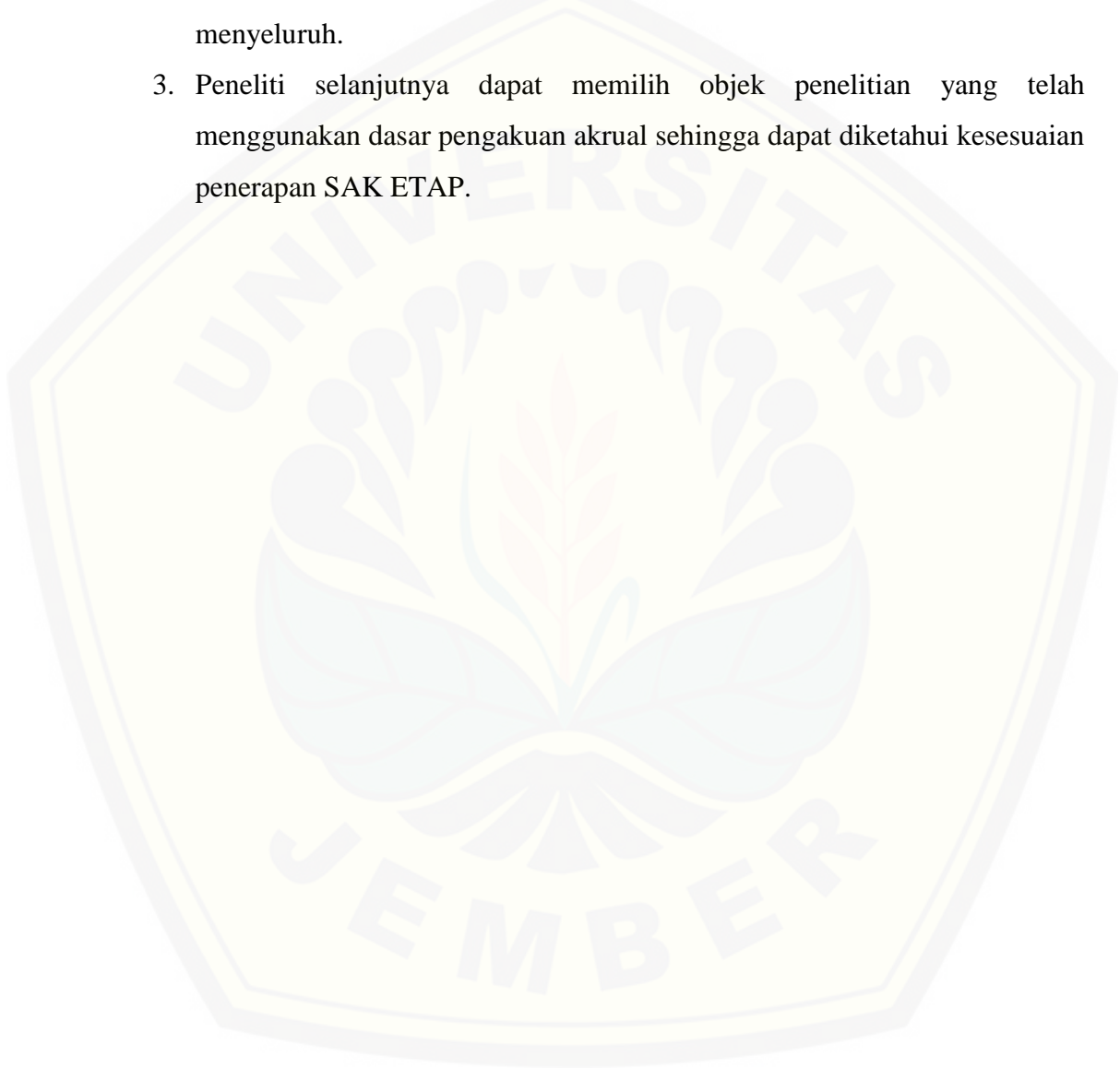
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mencari objek penelitian yang lebih terbuka sehingga dapat melakukan rekonstruksi

berupa sistem atau prosedur laporan keuangan jika terjadi ketidak sesuaian standar laporan keuangan yang disusun oleh entitas.

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas fokus penelitian dengan menggunakan beberapa objek penelitian sehingga dapat diketahui penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi secara menyeluruh.
3. Peneliti selanjutnya dapat memilih objek penelitian yang telah menggunakan dasar pengakuan akrual sehingga dapat diketahui kesesuaian penerapan SAK ETAP.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin. 2011. *Konvergensi PSAK (Khususnya PSAK 27 Akuntansi Koperasi) Ke IFRS*. <https://foindonesia.blogspot.com/2011/02/konvergensi-psak-khususnya-psak-27.html>. [Diakses pada 14 Oktober 2018].
- Alfitri, A., Ngadiman, Sohidin. 2012. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Koperasi Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten*. 2 (2): 135-147.
- Anoraga dan Widiyanti. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. 2017. Tabel Jumlah Koperasi pada Periode 2006-2017. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1314/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi-2006-2017.html> [Diakses pada 22 Oktober 2018].
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/pusat> [Diakses pada 1 September 2018]
- Martani, Dwi., Sylvia Veronica Nps, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Edisi Dua, Jakarta: Slemba Empat.

- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. Jakarta
- Miles, Matthew B., A. Michel Hubweman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Pemuda Rosdakarya.
- Nasir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Rosyidi, S. 2009. *Pendekatan Keapada Teori Ekonomi Mikro dan Makro Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitiatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Faturrozi. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Jember: STAIN Jember Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. *Tentang Perkoperasian*. Jakarta.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbit Universitas Jember.

Lampiran 1

Daftar Wawancara

Nama : H. Sri Wulandari
 Jabatan : Ketua Koperasi Simpan Pinjam X
 Umur : 47 Tahun

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan tersebut?	Proses pencatatan laporan keuangannya masih manual dan terkomputerisasi
Apakah ada bagian atau divisi khusus untuk pencatatan akuntansi? Lalu siapa yang menyusun laporan keuangan harian dan bulanan di koperasi ini?	Tidak ada Untuk laporan hariannya disusun oleh karyawan
Dalam membuat laporan keuangan, komponen laporan keuangan apa saja yang dihasilkan selama ini?	Ada Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas
Apakah anda mengalami kesulitan atau masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan? Jika ada, kesulitan apa saja yang Anda alami?	Kalo kesulitan itu pasti ada, terutama pada SDMnya dan juga faktor usia para pengurus disini
Apakah ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai SAK ETAP?	Sudah Pelatihannya pada tahun 2013, dan mulai diterapkan sedikit-sedikit ditahun 2014
Bagaimana menurut ibu dengan hadirnya SAK ETAP yang ditujukan untuk mempermudah para pelaku koperasi dan UKM untuk menyusun laporan keuangan?	Menurut saya dengan hadirnya perubahan standar belum tentu bisa diterima dilapangan, seperti kita ini kan keterbatasannya SDM, jadi sementara yang tujuannya mempermudah menjadi sedikit rumit.
Dalam menyusun laporan keuangannya dasar apa yang digunakan pada koperasi ini? Akrual/kas basis?	Disini menggunakan kas basis

<p>Apa saja jenis-jenis pendapatan yang ada pada usaha Anda?</p>	<p>Sesuai yang ada di laporan laba rugi yaitu ada penerimaan dari bunga simpan pinjam, hasil usaha koperasi, biaya administrasi, pendapatan bunga dari bank dan penerimaan lain-lain seperti penjualan atau pendapatan koperasi yang tidak sering didapatkan</p>
<p>Kapan anda mengakui pendapatan yang masuk pada usaha ibu?</p>	<p>Pendapatan diakui ketika terjadinya transaksi yang berkaitan dengan pendapatan</p>
<p>Bagaimana ibu mengukur pendapatan dan biaya pada usaha Anda?</p>	<p>Diukur berdasarkan nilai nominal</p>
<p>Metode penyusutan seperti apa yang digunakan untuk aset tetap usaha Anda?</p>	<p>Di koperasi ini menggunakan metode penyusutan garis lurus tanpa sisa dan masing-masing disusutkan sesuai dengan PSAK No.27</p>
<p>Kapan Anda mengakui aset dalam usaha Anda?</p>	<p>Aset diakui ketika terjadi transaksi</p>
<p>Bagaimana Anda mengakui kewajiban dalam usaha Anda?</p>	<p>Kita akui pada saat terjadi transaksi</p>
<p>Bagaimana Anda mengukur kewajiban dalam usaha Anda?</p>	<p>Ya diukur berdasarkan nilai nominalnya</p>
<p>Metode apa yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas yang Anda buat?</p>	<p>Kami menggunakan metode tidak langsung untuk menyusunnya</p>
<p>Apakah Anda membuat catatan atas laporan keuangan (CALK)?</p>	<p>Tidak, kami tidak membuatnya</p>
<p>Mengapa di koperasi ini tidak membuat catatan atas laporan keuangan (CALK), bukankah laporan keuangan lengkap sesuai dengan SAK ETAP itu juga termasuk CALK?</p>	<p>Karena dengan membuat laporan seperti ini saja sudah diterima oleh dinas koperasi kabupaten dan mengenai SAK ETAP sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya dari dinas. Pelatihannya hanya sekali dan tidak berkelanjutan sehingga kami kurang menguasai standar tersebut dan hanya menerapkan sebisanya saja. Jadi yang kita punya hanya berita acara</p>

Lampiran 2

Daftar Wawancara

Nama : Sundari

Jabatan : Bendahara Koperasi Simpan Pinjam X

Umur : 47 Tahun

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan tersebut?	Selama ini proses pencatatan laporan keuangannya masih manual dan terkomputerisasi
Apakah ada bagian atau divisi khusus untuk pencatatan akuntansi? Lalu siapa yang menyusun laporan keuangan harian dan bulanan di koperasi ini?	Belum ada, saya sendiri yang menyusun laporan hariannya
Dalam membuat laporan keuangan, komponen laporan keuangan apa saja yang dihasilkan selama ini?	Ada laporan pendapatan/jasa, laporan administrasi, laporan piutang anggota, dan laporan pendapatan lain-lain
Apakah anda mengalami kesulitan atau masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan? Jika ada, kesulitan apa saja yang Anda alami?	Ada, apalagi untuk menyesuaikan dengan standar baru yang diterapkan. Hal ini sebenarnya karena tidak ada bagian khusus di bidang akuntansi
Apakah bapak sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai SAK ETAP? Kapan itu pak? Dan sudah berapa kali dilakukan pelatihan mengenai SAK ETAP ini?	Sudah pernah di tahun 2013 tetapi hanya sekali saja di dinas koperasi
Bagaimana menurut anda dengan hadirnya SAK ETAP yang ditujukan untuk mempermudah para pelaku koperasi dan UKM untuk menyusun laporan keuangan?	Dengan adanya SAK ETAP ini memudahkan pengurus dalam menyusun laporan keuangannya yang sesuai dengan standar khusus untuk koperasi dan UKM. Selain itu, laporan yang sesuai standar ini

	memudahkan kami jika ingin melakukan pengajuan kredit ke bank
Dalam menyusun laporan keuangannya dasar apa yang digunakan pada koperasi ini? Akrual/kas basis?	Untuk menyusunnya kami menggunakan dasar kas basis
Apa saja jenis-jenis pendapatan yang ada pada usaha Anda?	Pendapatan operasional yang sesuai pada laporan laba rugi
Kapan anda mengakui pendapatan dan beban yang masuk pada usaha Anda?	Saat terjadinya transaksi
Bagaimana anda mengukur pendapatan dan beban pada usaha Anda?	Berdasarkan nilai nominal dari pendapatan tersebut
Metode penyusutan seperti apa yang digunakan untuk aset tetap usaha Anda?	Di koperasi ini menggunakan metode penyusutan garis lurus tanpa sisa dan masing-masing disusutkan sesuai dengan PSAK No.27
Kapan Anda mengakui aset dalam usaha Anda?	Aset diakui ketika terjadi transaksi
Bagaimana Anda mengakui kewajiban dalam usaha Anda?	Kita akui ketika terjadi transaksi berkaitan dengan kewajiban
Bagaimana Anda mengukur kewajiban dalam usaha Anda?	Berdasarkan nilai nominalnya
Metode apa yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas yang Anda buat?	Menggunakan metode tidak langsung
Apakah Anda membuat catatan atas laporan keuangan (CALK)?	Tidak, kami tidak membuatnya
Mengapa di koperasi ini tidak membuat catatan atas laporan keuangan (CALK), bukankah laporan keuangan lengkap sesuai dengan SAK ETAP itu juga termasuk CALK?	Karena kita sudah membuat berita acara, jika terjadi perubahan nominal yang signifikan kami mengakuinya di berita acara.

KOPERASI SIMPAN PINJAM X							
NERACA							
Per 31 Desember 2017							
ASET LANCAR		2017	2016	KEWAJIBAN		2017	2016
Kas	Rp	58.436.632	Rp 32.268.120	Simpanan Berjangka	Rp	78.698.986	Rp 52.379.392
Bank Central Asia	Rp	47.715.725	Rp 22.665.206	Simpanan Sukarela	Rp	55.354.000	Rp 48.098.000
Bank BRI	Rp	23.857.863	Rp 8.499.452	Simpanan Hari Raya	Rp	41.642.728	Rp 29.985.637
Bank Jatim	Rp	31.907.167	Rp 16.998.904	Dana Pengurus	Rp	-	Rp -
Piutang Simpan Pinjam	Rp	72.000.000	Rp 101.955.783	Dana Karyawan	Rp	-	Rp -
Piutang Unit Usaha	Rp	42.511.186	Rp 37.450.000	Dana Pendidikan	Rp	5.509.377	Rp 1.440.000
Piutang lain-lain	Rp	23.538.000	Rp 17.102.000	Dana Sosial	Rp	10.500.000	Rp 5.800.000
Penyisihan penghapusan pinjaman	Rp	(25.350.500)	Rp (10.119.270)	Hutang Bank Jatim	Rp	66.000.000	Rp 100.000.000
				Hutang Koperasi Lain	Rp	30.000.000	Rp 18.000.000
Jumlah aset lancar	Rp	275.016.073	Rp 226.820.195	Beban yang masih harus dibayar	Rp	-	Rp 6.500.000
ASET TIDAK LANCAR				Jumlah Kewajiban Lancar	Rp	287.705.092	Rp 262.203.029
Investasi jangka panjang:				EKUITAS			
Simpanan pokok puskopwaru	Rp	1.084.000	Rp 784.000	Simpanan Pokok anggota	Rp	54.200.000	Rp 39.200.000
Simpanan Wajib Puskopwan	Rp	1.538.100	Rp 998.100	Simpanan Wajib Anggota	Rp	102.540.000	Rp 66.540.000
Simpanan Wajib Khusus Puskopwan	Rp	1.025.400	Rp 665.400	Cadangan koperasi	Rp	32.166.831	Rp 19.279.368
Penyertaan unit simpan pinjam	Rp	2.100.000	Rp 2.000.000	Donasi	Rp	55.000.000	Rp 100.000.000
Jumlah Penyertaan	Rp	5.747.500	Rp 4.447.500	Modal Penyertaan	Rp	50.000.000	Rp 50.000.000
ASET TETAP				SHU Tahun Berjalan	Rp	58.977.000	Rp 34.218.000
Inventaris	Rp	9.415.000	Rp 4.415.000	Jumlah Ekuitas	Rp	352.883.831	Rp 309.237.368
Akm. Penyusutan Inventaris	Rp	(1.849.000)	Rp (1.566.000)				
Sepeda Motor	Rp	33.199.305	Rp 36.888.117				
Akm. Penyusutan Sepeda Motor	Rp	(3.319.931)	Rp (3.688.812)				
Mobil	Rp	52.365.740	Rp 58.184.156				
Akm. Penyusutan Mobil	Rp	(5.236.574)	Rp (5.818.416)				
Bangunan	Rp	112.707.176	Rp 125.230.196				
Akm. Penyusutan Bangunan	Rp	(11.270.718)	Rp (12.523.020)				
Tanah	Rp	173.814.350	Rp 139.051.480				
Jumlah Aset Tetap	Rp	359.825.350	Rp 340.172.702				
TOTAL ASET	Rp	640.588.923	Rp 571.440.397	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp	640.588.923	Rp 571.440.397

KOPERASI SIMPAN PINJAM X		
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Per 31 Desember 2017		
KETERANGAN	2017	2016
I. PENDAPATAN		
Bunga unit simpan pinjam	Rp 41.667.583	Rp 26.370.466
Penerimaan unit Usaha Toko	Rp 109.683.791	Rp 87.747.033
Penerimaan administrasi	Rp 7.760.000	Rp 3.208.000
Penerimaan bunga Bank	Rp 7.965.626	Rp 5.372.501
Penerimaan Lain-lain	Rp 11.600.000	Rp 7.280.000
TOTAL PENDAPATAN	Rp 178.677.000	Rp 129.978.000
II. BEBAN-BEBAN		
Honor karyawan	Rp 48.000.000	Rp 38.400.000
Biaya rapat triwulan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Honor pengurus	Rp 32.400.000	Rp 25.920.000
Bunga simpanan	Rp 2.100.000	Rp 1.680.000
Bunga simpanan berjangka	Rp 2.400.000	Rp 1.920.000
Beban ATK	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000
Biaya RAT	Rp 4.500.000	Rp 3.600.000
Beban pemeliharaan harta tetap	Rp 3.000.000	Rp 2.400.000
Penambahan alat Kantor	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000
Diklat perkoperasian	Rp 1.000.000	Rp 800.000
Beban transport	Rp 2.000.000	Rp 1.600.000
Beban listrik	Rp 7.200.000	Rp 5.760.000
Beban air PDAM	Rp 3.600.000	Rp 2.880.000
Lain-lain	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000
Tak terduga	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000
TOTAL BEBAN-BEBAN	Rp 119.700.000	Rp 96.360.000
SHU SEBELUM PAJAK	Rp 58.977.000	Rp 34.218.000
PAJAK 10%	Rp 5.897.700	Rp 3.421.800
SHU SESUDAH PAJAK	Rp 53.079.300	Rp 30.796.200

KOPERASI SIMPAN PINJAM X		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
Per 31 Desember 2017		
KETERANGAN	SUBJUMLAH	JUMLAH
EKUITAS		
Simpanan Pokok anggota	Rp 39.200.000	
Simpanan Wajib Anggota	Rp 66.540.000	
Cadangan koperasi	Rp 19.279.368	
Donasi	Rp 100.000.000	
Modal Penyertaan	Rp 50.000.000	
SHU Tahun Berjalan	Rp 34.218.000	
Saldo ekuitas akhir tahun 2016		Rp 309.237.368
Kenaikan/(Penurunan)		
Simpanan Pokok anggota	Rp 15.000.000	
Simpanan Wajib Anggota	Rp 36.000.000	
Cadangan koperasi	Rp 12.887.463	
Donasi	Rp (45.000.000)	
Modal Penyertaan	Rp -	
SHU Tahun Berjalan	Rp 24.759.000	
Perubahan Modal		Rp 43.646.463
Saldo ekuitas akhir tahun 2017		Rp 352.883.831

KOPERASI SIMPAN PINJAM X		
LAPORAN ARUS KAS		
Per 31 Desember 2017		
KETERANGAN	SUBJUMLAH	JUMLAH
Aktivitas operasi		
SHU Tahun Berjalan	Rp 24.759.000	
Piutang Usaha	Rp (24.494.597)	
Piutang Lain-lain	Rp 11.897.186	
Penyisihan piutang tak tertagih	Rp (8.795.230)	
Kenaikan/(Penurunan)	Rp -	
Simpanan Berjangka	Rp 26.319.594	
Simpanan Sukarela	Rp 7.256.000	
Simpanan Hari Raya	Rp 11.657.091	
Dana Pengurus	Rp -	
Dana Karyawan	Rp -	
Dana Pendidikan	Rp 4.069.377	
Dana Sosial	Rp 4.700.000	
Beban yang masih harus dibayar	Rp (6.500.000)	
Hutang bank	Rp (34.000.000)	
Hutang koperasi lain	Rp 12.000.000	
Biaya penyusutan	Rp (1.920.025)	
TOTAL ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		Rp 26.948.397
Arus kas dari aktivitas investasi		
Aset Tetap	Rp 34.349.845	
Simpanan pokok Puskowanjati	Rp 300.000	
Simpanan Wajib Puskowanjati	Rp 540.000	
Simpanan Wajib Khusus Puskowanjati	Rp 360.000	
Penyertaan unit simpan pinjam	Rp 100.000	
	Rp -	
TOTAL ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		Rp 35.649.845
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Kenaikan/(Penurunan)		
Simpanan Pokok anggota	Rp 15.000.000	
Simpanan Wajib Anggota	Rp 36.000.000	
Cadangan koperasi	Rp 12.887.463	
Donasi	Rp (45.000.000)	
TOTAL ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		Rp 18.887.463
TOTAL ARUS KAS		Rp 81.485.705
SALDO KAS AWAL PERIODE		Rp 80.431.682
SALDO KAS AKHIR PERIODE		Rp 161.917.387